B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan penulis secara langsung selama kuliah kerja praktek di Bapeda Propinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RASK pada Bapeda Propinsi Jawa Barat merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertangung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 38 tahun 2002 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat.
2. Waktu penyusunan RASK, mulai dari persiapan sampai dengan pengesahan dari kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat cenderung masih sangat singkat sehingga pada proses penyusunannya tidak tertutup kemungkinan masih adanya kesalahan – kesalahan yang sifatnya teknis seperti pengkoderekeningan, pengetikan dan sebagainya.
3. Aspek koordinasi masih menjadi hambatan utama, karena unsur yang terkait dalam penyusunan RASK di lingkungan Bapeda Propinsi Jawa Barat mempunyai kesibukan yang padat. Hal ini disebabkan karena penyusunan RASK merupakan salah satu

bagian kegiatan dari sekian kegiatan di Bapeda Propinsi Jawa Barat pada waktu yang sama.

4.2 Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas maka Penulis ingin mengajukan saran – saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Bapeda Propinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penerapan sistem anggaran yang masih mengalami penyesuaian-penyesuaian maka harus ada pengendalian dan pengawasan langsung dari pimpinan dalam rangka penyusunan RASK di Bapeda Propinsi Jawa Barat.
2. Kegiatan penyusunan RASK harus dijadwalkan secara terjadwal pada jadwal kegiatan Bapeda Propinsi Jawa Barat setiap tahunya untuk mengoptimalkan tujuan penyusunan RASK.
3. Penunjukan personil penyusunan RASK Bapeda Propinsi Jawa Barat harus yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dan pembagian tugas harus di depinifkan dalam bentuk surat tugas dari kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat serta harus adanya koordinasi antar personil penyusun RASK.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM